



**MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA
SAING PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN
LEVEL 1**

2025

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP Menyusun pedoman dalam penghitungan capaian indikator kinerja utama yang dikenal dengan sebutan Manual IKU.

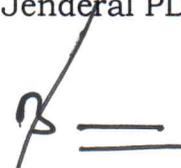
Manual IKU berisikan penjabaran dari tiap-tiap IKU berupa : Nama IKU, Definisi IKU, Formula Perhitungan IKU, Satuan IKU, Tingkat Validitas IKU, Sumber Data Perhitungan IKU, Pola perhitungan data IKU, Polarisasi, dan Periode Pelaporan.

Sebagai landasan dalam penyajian capaian indikator kinerja utama Ditjen PDSPKP tahun 2025, kiranya dokumen Manual IKU ini dapat dijadikan acuan dalam perhitungan angka capaian.

Kami berharap agar dokumen Manual IKU Ditjen PDSPKP tahun 2025 ini dapat digunakan secara bijak oleh seluruh *stakeholder* Ditjen PDSPKP.

Jakarta 22 Januari 2025

Direktur Jenderal PDSPKP



Budi Sulistiyo

Nomor Urut	:	IK 1
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Ekspor Rumput Laut
2. Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen (UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan) - Komoditas rumput laut adalah komoditas hasil perikanan yang masuk ke dalam jenis rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (<i>algae</i>) yang ditangani, diolah, dan atau dijadikan produk akhir dalam bentuk rumput laut segar, kering, atau olahan. - Ekspor rumput laut adalah kegiatan mengeluarkan komoditas rumput laut dari wilayah pabean (<i>the custom frontier</i>) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta komoditas rumput laut yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut. - Pos Tarif Hasil Perikanan adalah Pos Tarif/ Harmonized System (HS) dalam buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2022 yang diidentifikasi memenuhi kriteria sebagaimana pengertian perikanan dalam peraturan per Undang-Undang yang berlaku. - Nilai ekspor rumput laut adalah nilai komoditas rumput laut yang dikeluarkan dari wilayah pabean (<i>the custom frontier</i>) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta komoditas rumput laut yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut yang dihitung dalam satuan US Dollar (USD).
3. Formula Perhitungan	:	$E = \sum_{i=1}^n E_i$

		<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - E = Nilai ekspor rumput laut - Ei = Nilai rumput laut ke-i yang diekspor - N = Banyaknya rumput laut yang diekspor
4. Satuan	:	USD Miliar
5. Tingkat Validitas	:	() Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah (x) Outcome
6. Sumber Data	:	Badan Pusat Statistik
7. Pola Perhitungan	:	() Akumulasi () Rata-rata (x) Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	(x) Maximize () Minimize () Stabilize
9. Periode Pelaporan	:	() Bulanan (x) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Nomor Urut	: IK 2
1. Nama Indikator Kinerja	: Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya
2. Definisi	<ul style="list-style-type: none"> - Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen (UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan) - Komoditas produk perikanan lainnya adalah komoditas hasil perikanan yang ditangani, diolah, dan atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan olahan di luar komoditas rumput laut. - Ekspor produk perikanan lainnya adalah kegiatan mengeluarkan komoditas produk perikanan lainnya dari wilayah pabean (the custom frontier) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta komoditas produk perikanan lainnya yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut. - Pos Tarif Hasil Perikanan adalah Pos Tarif/ Harmonized System (HS) dalam buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022 yang diidentifikasi memenuhi kriteria sebagaimana pengertian perikanan dalam peraturan per Undang-Undangan yang berlaku. - Nilai ekspor produk perikanan lainnya adalah nilai komoditas produk perikanan lainnya yang dikeluarkan dari wilayah pabean (<i>the custom frontier</i>) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta komoditas produk perikanan lainnya yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut yang dihitung dalam satuan US Dollar (USD).

3. Formula Perhitungan	:	$E = \sum_{i=1}^n E_i$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - E = Nilai ekspor produk perikanan lainnya - E_i = Nilai produk perikanan lainnya ke-i yang diekspor - N = Banyaknya produk perikanan lainnya yang diekspor
4. Satuan	:	USD Miliar
5. Tingkat Validitas	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah (x) Outcome
6. Sumber Data	:	Badan Pusat Statistik
7. Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata (x) Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	(x) Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
9. Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan (x) Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Nomor Urut	:	IK 3
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri
2. Definisi	:	<p>Total nilai yang dihasilkan dari serapan produk perikanan dalam rumah tangga nasional.</p> <p>Penghitungan nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri menggunakan basis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik yang diperoleh 1 (satu) tahun setelah tahun berjalan, sehingga capaian yang dihasilkan merupakan angka prognosa.</p>
3. Formula Perhitungan	:	<p>Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri :</p> <p style="text-align: center;">Rerata Harga x Serapan Ikan</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rerata harga merupakan rerata harga produk perikanan nasional. - Serapan ikan merupakan ikan rumah tangga pada periode 1 (satu) tahun.
4. Satuan	:	Rp Triliun
5. Tingkat Validitas	:	() Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah (x) Outcome
6. Sumber Data	:	Badan Pusat Statistik
7. Pola Perhitungan	:	() Akumulasi () Rata-rata (x) Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	(x) Maximize () Minimize () Stabilize
9. Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (x) Tahunan

Nomor Urut	: IK 4																																																					
1. Nama Indikator Kinerja	: Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas																																																					
2. Definisi	<p>Usaha mikro dan usaha kecil bidang pengolahan produk KP yang meningkat skalanya dihitung berdasarkan 6 aspek usaha (legalitas, peningkatan omset, peningkatan aset, peningkatan produksi, perluasan pasar, peningkatan tenaga kerja). Berdasarkan Kepdirjen PDSPKP No. 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Naik Kelas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, penetapan kelas usaha dari pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diperoleh dari total pembobotan, dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas Mikro, merupakan kelas terbawah dengan batas nilai skoring 0 s.d 50; 2. Kelas Kecil, dengan batas nilai skoring 51 s.d 70; 3. Kelas Menengah, dengan batas nilai skoring 71 sd 100; <p>Penilaian klasifikasi kelas usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan dihitung berdasarkan rincian kriteria sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="548 1163 1516 1837"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Aspek</th> <th colspan="3">Skala</th> </tr> <tr> <th>Mikro</th> <th>Kecil</th> <th>Menengah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Legalitas dan Perizinan Usaha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SKP</td> <td>C</td> <td>B</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HACCP dan HC</td> <td>Tidak Ada</td> <td>HACCP</td> <td>HACCP dan HC</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajemen Sumber Daya Manusia</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah tenaga kerja</td> <td>< 5 org</td> <td>6-19 orang</td> <td>20-99 orang</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Manajemen Produksi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volume Produksi/Penjualan Per tahun (ton)</td> <td><20 ton</td> <td>20-150 ton</td> <td>> 150 ton</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nilai aset/modal usaha (Rp/thn)</td> <td><1 Milyar</td> <td>1-5 Milyar</td> <td>>5 Milyar</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Manajemen Keuangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Aspek	Skala			Mikro	Kecil	Menengah	1	Legalitas dan Perizinan Usaha					SKP	C	B	A		HACCP dan HC	Tidak Ada	HACCP	HACCP dan HC	2	Manajemen Sumber Daya Manusia					Jumlah tenaga kerja	< 5 org	6-19 orang	20-99 orang	3	Manajemen Produksi					Volume Produksi/Penjualan Per tahun (ton)	<20 ton	20-150 ton	> 150 ton		Nilai aset/modal usaha (Rp/thn)	<1 Milyar	1-5 Milyar	>5 Milyar	4	Manajemen Keuangan			
No	Aspek			Skala																																																		
		Mikro	Kecil	Menengah																																																		
1	Legalitas dan Perizinan Usaha																																																					
	SKP	C	B	A																																																		
	HACCP dan HC	Tidak Ada	HACCP	HACCP dan HC																																																		
2	Manajemen Sumber Daya Manusia																																																					
	Jumlah tenaga kerja	< 5 org	6-19 orang	20-99 orang																																																		
3	Manajemen Produksi																																																					
	Volume Produksi/Penjualan Per tahun (ton)	<20 ton	20-150 ton	> 150 ton																																																		
	Nilai aset/modal usaha (Rp/thn)	<1 Milyar	1-5 Milyar	>5 Milyar																																																		
4	Manajemen Keuangan																																																					

		Laporan Keuangan	tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan Usaha Pengolahan Ikan	manajemen keuangan secara sederhana	menerapkan sistem akuntansi
		Performa kredit	belum memiliki akses perbankan	UMKM yang telah mengakses kredit program	UMKM yang telah mengakses kredit komersial/ korporasi
	5	Manajemen pemasaran			
		Tujuan pemasaran	Lokal (skala kab/kota)	Regional (Provinsi)	Nasional
		Metode pemasaran	Sendiri	Kerjasama dengan pihak lain	Memiliki jaringan pemasaran yang luas
		Hasil Pejualan/Omset	< 2 Milyar	2-15 milyar	15-50 Milyar
	No	Aspek	Skala		
			Mikro	Kecil	Menengah
	6	Manajemen operasional			
		Ketersediaan bahan baku	Sekali produksi	menerapkan manajemen stock	menerapkan manajemen stock
3. Formula Perhitungan	:	$\Sigma n\% = \frac{\Sigma n1 + \Sigma n2}{\Sigma nt} \times 100\%$ <p> Σn %= Persentase Peningkatan Skala UMKM Pengolahan Produk KP Σn1 = Jumlah usaha mikro yang meningkat skalanya menjadi usaha kecil Σn2 = Jumlah usaha kecil yang meningkat skalanya menjadi usaha menengah Σnt = Jumlah UMKM yang dibina </p>			
4. Satuan	:	Persen			
5. Tingkat Validitas	:	() Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah (x) Outcome			
6. Sumber Data	:	Kemenkop dan UKM, Dinas Perikanan Prov/Kab			

7. Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

Nomor Urut	:	IK 5
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP
2. Definisi	:	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa.
3. Formula Perhitungan	:	<p>Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PDSPKP =</p> $\sum_{i=1}^n ((\text{Nilai Indikator} \times \text{Bobot Indikator}) : \text{batas Atas})$
4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	() Output Kendali Tinggi (x) Output Kendali Rendah () Outcome
6. Sumber Data	:	Biro SDMAO
7. Pola Perhitungan	:	() Akumulasi () Rata-rata (x) Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	(x) Maximize () Minimize () Stabilize
9. Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (x) Tahunan

